

**POLITIK IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA
DI KAWASAN SOEMANTRI BROJONEGORO KOTA JAMBI**

M. Wira Anshori¹, Jefri Al Kausar², Fajar Alan Syahrier³, Galank Pratama⁴, Mirza Sazeta⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Jambi

Email Korespondensi: wiraanshori@unja.ac.id

ABSTRACT

The dynamics of policy implementation regarding street vendor (PKL) arrangement in the Soemantri Brojonegoro Area, Jambi City, are analyzed in this study through the lens of political implementation and power relations. This research primarily focuses on how interactions between key actors and informal negotiations influence the sustainability of the 'Pesona Kuliner Soemantri' strategic project. Utilizing a descriptive qualitative method, data were gathered through field observations, in-depth interviews, and documentation studies. The findings indicate that the implementation process does not proceed linearly but is characterized by a continuous contestation of interests. A phenomenon of 'pseudo-sustainability' was identified, where trader compliance with spatial regulations is often temporary and highly situational. This condition is significantly driven by the use of discretion by local law enforcement officers acting as street-level bureaucrats, who frequently opt for informal negotiations and compromises to maintain social stability and prevent open conflict. The unequal power relations between government authorities emphasizing urban aesthetics and traders striving for economic survival create a dynamic yet fragile negotiation space. The study concludes that the success of street vendor arrangement is heavily dependent on a shift from coercive approaches toward more inclusive and participatory governance. This research recommends the strengthening of dialogue mechanisms and the involvement of informal actors in every stage of public space policy decision-making to ensure long-term policy effectiveness.

Keywords: Policy Politics, Street Vendor Arrangement, Power Relations, Street-Level Bureaucracy.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika politik implementasi dalam kebijakan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kawasan Soemantri Brojonegoro, Kota Jambi. Fokus utama penelitian ini adalah membedah bagaimana relasi kuasa antaraktor dan negosiasi informal mempengaruhi keberlanjutan kebijakan yang dibranding sebagai 'Pesona Kuliner Soemantri'. Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui observasi lapangan, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan di kawasan ini tidak berjalan secara linear, melainkan penuh dengan kontestasi kepentingan. Ditemukan adanya fenomena 'keberlanjutan semu', di mana kepatuhan pedagang terhadap aturan penataan seringkali bersifat sementara dan situasional. Hal ini dipicu oleh penggunaan diskresi oleh aparat penegak aturan di lapangan sebagai street-level bureaucracy yang cenderung menempuh jalan negosiasi informal dan kompromi demi menjaga stabilitas sosial serta menghindari konflik terbuka. Relasi kuasa yang timpang antara otoritas pemerintah yang menekankan estetika kota dan pedagang yang memperjuangkan akses ekonomi menciptakan ruang negosiasi yang dinamis namun rapuh. Penelitian menyimpulkan bahwa keberhasilan penataan PKL sangat bergantung pada transformasi dari pendekatan koersif menuju tata kelola yang lebih inklusif. Rekomendasi penelitian ini menekankan pentingnya penguatan mekanisme dialog dan pelibatan aktor informal dalam setiap tahapan pengambilan keputusan kebijakan ruang publik.

Kata kunci: Politik Implementasi, Penataan PKL, Relasi Kuasa, Street-Level Bureaucracy.

PENDAHULUAN

Kebijakan publik pada hakikatnya bukan sekadar instrumen administratif untuk mencapai tujuan negara, melainkan sebuah proses politik yang sarat dengan kontestasi kepentingan antaraktor. Setiap kebijakan merupakan hasil kompromi kompleks antara berbagai tujuan, nilai, dan praktik yang berinteraksi dalam konteks sosial tertentu, sehingga implementasinya tidak pernah sepenuhnya netral dari relasi kekuasaan (Hupe et al., 2013). Dalam konteks perkotaan Indonesia, penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) menjadi salah satu isu kebijakan yang paling kompleks dan kontroversial karena mempertemukan dua kepentingan yang saling berbenturan: di satu sisi, kepentingan penataan ruang dan estetika kota; di sisi lain, kebutuhan ekonomi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah yang bergantung pada aktivitas perdagangan informal (Alim, 2024).

Penataan kawasan ini bukan sekadar tindakan administratif rutin, melainkan bagian dari proyek strategis Pemerintah Kota Jambi yang dibranding melalui nama 'Pesona Kuliner Soemantri'. Melalui branding ini, otoritas negara berusaha mendefinisikan ulang batas antara ruang publik formal dan aktivitas ekonomi informal, dengan visi mengubah koridor Sipin menjadi ikon pariwisata kuliner baru yang modern dan tertata. Upaya ini didukung oleh komitmen anggaran yang signifikan, termasuk alokasi dana sebesar Rp13 miliar untuk pembangunan pedestrian tahap pertama, sebagai bentuk penggunaan kekuasaan material pemerintah dalam menciptakan narasi estetika kota yang mampu bersaing dengan pusat keramaian lainnya.

Implementasi kebijakan penataan PKL di koridor ini bukan sekadar upaya administratif, melainkan bagian dari proyek strategis yang dibranding sebagai 'Pesona Kuliner Soemantri'. Besarnya komitmen politik (political will) Pemerintah Kota Jambi dalam mentransformasi kawasan ini dibuktikan dengan alokasi anggaran yang sangat signifikan untuk pembangunan infrastruktur pedestrian. Tercatat, pembangunan pedestrian Tahap I menyerap anggaran sebesar Rp13 miliar, yang kemudian direncanakan berlanjut pada Tahap II dengan alokasi Rp7 miliar, serta penataan kawasan Rumah Dinas Walikota senilai Rp8 miliar. Angka-angka ini menunjukkan penggunaan kekuasaan material pemerintah untuk menciptakan narasi modernitas dan estetika kota yang lebih formal di koridor Sipin

Tabel 1: Rincian Alokasi Anggaran dan Cakupan Wilayah Proyek Strategis “Pesona Kuliner Soemantri”

Proyek Infrastruktur	Cakupan Wilayah Pelaksanaan	Alokasi Anggaran	Status/Tahun
Pedestrian Tahap I	Perempatan Telkom - Simpang Honda Sipin	Rp13.000.000.000	Selesai (2024)
Pedestrian Tahap II	Simpang Honda Sipin - Tugu Juang	Rp7.000.000.000	Terencana (2025)
Penataan Rumah Dinas	Kawasan Depan Kediaman Walikota	Rp8.000.000.000	Berjalan (2024)
Fasilitas Wisata	Gapura Selamat Datang & Ikon Kota	Terpadu (Disparbud)	Berjalan (2024/2025)

Sumber : Data Olahan Penelitian (2026)

Penerapan anggaran ini tidak terlepas dari pengawasan publik dan tuntutan akan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 mengenai Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ). Dalam konteks ini, keberhasilan pembangunan pedestrian di Jalan Soemantri menjadi salah satu indikator kinerja utama bagi kepemimpinan daerah dalam mewujudkan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Jambi yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat dan estetika lingkungan perkotaan.

Fenomena ini mencerminkan dilema kebijakan yang lebih luas antara modernisasi perkotaan dan keadilan sosial bagi kelompok rentan. Di Kota Jambi, keberadaan PKL tersebar di berbagai titik strategis seperti Mayang, Pasar, Kotabaru, Sipin, Thehok, Selincah, dan Patimura, dengan konsentrasi yang cukup besar pada kawasan-kawasan yang berkembang menjadi pusat keramaian dan wisata keluarga. Kawasan Soemantri Brojonegoro (Sipin) merupakan salah satu koridor utama yang berkembang menjadi pusat kuliner dan ruang rekreasi favorit warga Jambi, dengan deretan PKL, ruko, dan fasilitas publik yang membentuk wajah modernitas kota. Namun, perkembangan yang pesat tersebut menimbulkan berbagai permasalahan serius, meliputi kemacetan lalu lintas akibat penyempitan badan jalan, penyusutan ruang pejalan kaki yang seharusnya diperuntukkan bagi pejalan kaki, serta kesemrawutan tata ruang yang menurunkan kualitas lingkungan perkotaan. Kondisi ini mendorong Pemerintah Kota Jambi untuk melakukan penataan dan penertiban melalui serangkaian kebijakan dan operasi lapangan yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satuan Polisi Pamong Praja) (Anugrah, 2024) (Septian Md, 2024).

Berbagai penelitian tentang PKL di Kota Jambi selama ini lebih banyak menyoroti aspek ekonomi dan karakteristik sosial-ekonomi pedagang, serta kualitas fasilitas fisik ruang pejalan kaki. Studi-studi tersebut mencakup penelitian tentang tingkat pelayanan fasilitas pedestrian di Jalan Soemantri Brojonegoro (Tambunan, 2022) dan analisis pendapatan PKL di berbagai lokasi lain di kota tersebut (Allam et al., 2019; Hanum, 2017; Inderianti et al., 2020). Sementara itu, kajian yang secara khusus menelaah dinamika relasi kuasa, negosiasi informal, dan diskresi aparat dalam implementasi kebijakan penataan PKL di kawasan Soemantri Brojonegoro masih sangat terbatas. Padahal, berbagai indikasi di lapangan seperti keberadaan parkir liar di jalur pedestrian, PKL yang kembali berjualan di zona terlarang setelah operasi penertiban berakhir, serta perbedaan perlakuan aparat terhadap pedagang tertentu menunjukkan adanya kesenjangan signifikan antara kebijakan tertulis dan praktik politik di lapangan. Penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut dengan mengungkap bagaimana praktik tata kelola dan negosiasi informal di tingkat lapangan membentuk pola spasial dan keberlanjutan keberadaan PKL di tengah masyarakat perkotaan yang memiliki kepentingan beragam. Konflik pemanfaatan ruang sering muncul ketika berbagai jenis pengguna harus diwadahi dalam satu ruang jalan yang terbatas, sehingga menimbulkan perbedaan persepsi mengenai prioritas kepentingan ketika alternatif penataan tidak terlihat jelas (Rantelabi, 2022). Kondisi ini memperlihatkan bahwa ruang publik tidak hanya berfungsi sebagai wadah fisik semata, melainkan juga sebagai arena kontestasi kepentingan antaraktor yang memperebutkan akses dan kontrol terhadap sumber daya spasial (Prasetyo, 2026). Perspektif ini selaras dengan pandangan bahwa penggunaan ruang publik pada praktiknya sering kali menyimpang dari regulasi formal karena adanya aktivitas ekonomi yang memanfaatkan ruang tersebut, sehingga menimbulkan tarik-menarik antara fungsi ruang sesuai ketentuan pemerintah dan realitas sosial di lapangan (Widiatedja & SH, 2026).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini secara umum bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif dinamika relasi kuasa antaraktor kunci pemerintah, Satuan Polisi Pamong Praja, pedagang, pemilik ruko, dan aktor informal dalam mempengaruhi keberlanjutan kebijakan penataan PKL di Kawasan Soemantri Brojonegoro. Secara lebih spesifik, penelitian ini berupaya mengidentifikasi dan mengkaji mekanisme diskresi yang digunakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja sebagai street-level bureaucracy dalam menjalankan kebijakan penataan di lapangan, serta mengeksplorasi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kesenjangan antara regulasi formal dan praktik implementasi di lapangan. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi kebijakan bagi perumusan model penataan

ruang publik yang lebih inklusif, deliberatif, dan sensitif terhadap kebutuhan ekonomi kelompok rentan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis bagi pengembangan ilmu kebijakan publik dan administrasi publik, khususnya dalam memahami dinamika implementasi kebijakan di tingkat lokal. Dari aspek teoretis, penelitian ini memperkaya diskursus akademis tentang interaksi antara teori street-level bureaucracy dan politik kebijakan publik dalam konteks penataan ruang perkotaan. Dari aspek praktis, temuan penelitian dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Kota Jambi dan pemerintah daerah lainnya dalam merumuskan kebijakan penataan PKL yang lebih efektif, berkelanjutan, dan berkeadilan. Orisinalitas penelitian ini terletak pada fokusnya yang secara spesifik menganalisis dimensi relasi kuasa dan praktik negosiasi informal dalam implementasi kebijakan penataan PKL di kawasan urban Indonesia, berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang cenderung berfokus pada aspek ekonomi pedagang atau kualitas infrastruktur fisik. Penggunaan perspektif kombinasi antara politik kebijakan publik dan teori street-level bureaucracy juga merupakan kontribusi orisinal yang belum banyak diterapkan dalam kajian penataan PKL di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus untuk memahami secara mendalam dinamika relasi kuasa dalam implementasi kebijakan penataan PKL di Kawasan Soemantri Brojonegoro. Pendekatan kualitatif dipilih karena fokus penelitian adalah mengungkap makna, pengalaman, dan strategi aktor-aktor yang terlibat dalam proses implementasi kebijakan, bukan menguji hubungan kausal antarvariabel secara kuantitatif (Hikam, 2023). Desain studi kasus memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi fenomena dalam konteksnya yang spesifik dan kompleks, serta menghasilkan pemahaman yang kaya dan mendalam tentang bagaimana kebijakan dipahami, dinegosiasikan, dan diimplementasikan oleh berbagai aktor di lapangan (Blakelock & Turnpenny, 2022). Lokasi penelitian ditetapkan di koridor Jalan Soemantri Brojonegoro, Kota Jambi, yang dikenal sebagai kawasan kuliner dan ruang publik dengan intensitas PKL serta aktivitas pejalan kaki yang tinggi. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada karakteristik ruang yang menjadi titik temu antara kepentingan ekonomi pedagang dan fungsi ketertiban umum kota, sehingga memungkinkan peneliti mengamati secara langsung interaksi antaraktor dalam konteks spasial yang nyata (Sabdey et al., 2023). Informan penelitian dipilih secara purposive dengan kriteria tertentu untuk memastikan bahwa informan memiliki pengetahuan dan pengalaman yang relevan dengan fokus penelitian, meliputi aparatur Pemerintah Kota Jambi khususnya dinas teknis terkait dan Satuan Polisi Pamong Praja yang bertugas di kawasan tersebut, PKL yang berjualan di sepanjang koridor Soemantri Brojonegoro, pemilik ruko dan toko di sekitar lokasi penelitian, serta aktor informal seperti koordinator pedagang atau tokoh lokal yang memiliki pengaruh dalam pengaturan ruang di kawasan tersebut (Matovich & Esper, 2023).

Pengumpulan data penelitian ini dilakukan secara komprehensif melalui tiga teknik utama, yakni wawancara mendalam semi-terstruktur secara purposive untuk menggali pengalaman informan, observasi langsung di koridor Jalan Soemantri Brojonegoro pada berbagai waktu guna memantau dinamika ruang publik, serta studi dokumentasi terhadap regulasi, laporan, dan media terkait penataan PKL di Kota Jambi (Purba & Wibawani, 2023). Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan model interaktif yang berlangsung secara siklis melalui tahapan reduksi data, penyajian data secara naratif, dan penarikan kesimpulan induktif untuk memetakan dinamika relasi kuasa antaraktor (Jacobs & George, 2023). Guna menjamin keabsahan temuan, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber (menyilangkan data dari pemerintah, pedagang, pemilik ruko, dan aktor informal) dan triangulasi teknik (wawancara, observasi, dokumentasi), disertai konfirmasi kepada informan kunci guna meminimalkan bias interpretasi (Mulyana et al., 2024), yang juga didukung oleh prinsip transparansi dan reflektivitas peneliti agar keseluruhan hasil dapat dipertanggungjawabkan secara metodologis.

PEMBAHASAN

Dalam konteks yuridis, implementasi penataan di Kawasan Soemantri Brojonegoro mencerminkan adanya evolusi paradigmatik dalam regulasi lokal Kota Jambi. Terjadi pergeseran mendasar dari Perda Nomor 5 Tahun 2006 yang bersifat restriktif dan berfokus pada kontrol ketertiban umum (pendekatan top-down), menuju Perda Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Perda terbaru ini memperkenalkan mekanisme 'legalitas bersyarat', di mana PKL tidak lagi dipandang sebagai pelanggar hukum semata, melainkan pelaku ekonomi yang diberikan hak akses ruang publik melalui izin tahunan, terutama bagi warga ber-KTP Jambi. Hal ini menandai perubahan cara pandang pemerintah dari sekadar melakukan pengusuran (koersif) ke arah pemberdayaan yang lebih inklusif.

Tabel 2: Perbandingan Paradigma Regulasi Penataan PKL di Kota Jambi

Dimensi Perbandingan	Perda No. 5 Tahun 2006	Perda No. 12 Tahun 2016
Fokus Utama	Ketertiban & Pengawasan Ketat	Penataan & Pemberdayaan Ekonomi
Metode Penanganan	Pengusuran dan pelarangan	Perizinan tahunan & zonasi waktu
Sifat Kebijakan	<i>Top-down</i> dan koersif	Inklusif dan legalitas bersyarat
Tujuan Akhir	Estetika kota (bebas PKL)	Integrasi ekonomi sektor informal

Sumber : Data Olahan Penelitian (2026)

Data perbandingan di atas menunjukkan bahwa secara normatif, Pemerintah Kota Jambi telah melakukan pergeseran paradigma dari pendekatan yang bersifat yustisial-koersif menuju pendekatan administratif-pemberdayaan. Kehadiran Perda Nomor 12 Tahun 2016 memberikan landasan bagi konsep 'legalitas bersyarat', di mana keberadaan PKL tidak lagi dianggap sebagai anomali tata ruang, melainkan elemen ekonomi yang harus diatur melalui skema zonasi dan waktu. Namun, transisi ini menciptakan tantangan baru di lapangan; meskipun regulasi mengedepankan pemberdayaan, Satpol PP seringkali terjebak dalam dilema antara menjalankan fungsi penertiban sesuai mandat estetika kota atau memberikan toleransi sesuai semangat pemberdayaan ekonomi sektor informal.

Konteks Spasial dan Karakteristik Kawasan Penelitian

Kawasan Jalan Soemantri Brojonegoro atau yang lebih dikenal sebagai koridor Sipin merupakan salah satu ruang publik paling dinamis di Kota Jambi, yang telah berkembang menjadi destinasi kuliner dan rekreasi favorit bagi warga kota maupun pendatang. Koridor ini membentang sepanjang kurang lebih dua kilometer, menghubungkan kawasan perumahan padat di bagian hulu dengan pusat kegiatan komersial dan pemerintahan di bagian hilir. Sepanjang koridor ini, deretan bangunan usaha berupa rumah toko (ruko) berdampingan dengan lapak-lapak Pedagang Kaki Lima (PKL) yang menjajakan berbagai produk mulai dari makanan dan minuman hingga pakaian dan aksesoris. Keunikan kawasan ini terletak pada fungsinya yang multifungsi: sebagai koridor transportasi, ruang komersial informal, area pejalan kaki, dan ruang sosial bagi komunitas lokal.

Gambar 1: Kawasan Kuliner Soemantri Kota Jambi



Sumber : <https://berita.rri.co.id/> (Tatik Wijaya, 2024)

Observasi awal yang dilakukan peneliti di kawasan ini mengungkapkan bahwa pola pemanfaatan ruang sangat kompleks dan berlapis-lapis. Pada jam-jam sibuk, terutama pagi hari menjelang siang dan sore hingga malam hari, koridor ini dipenuhi oleh berbagai aktivitas yang saling berbenturan dalam memperebutkan ruang yang terbatas. Kendaraan bermotor melaju perlahan di tengah kemacetan, pejalan kaki berjalan zigzag di antara kendaraan dan lapak, sementara PKL menawarkan dagangan kepada calon pembeli yang berhenti di tepi trotoar yang menyempit. Kondisi ini menciptakan kekacauan visual dan fungsional yang kontras dengan citra kota modern yang dicita-citakan oleh pemerintah daerah.

Data sekunder yang dikumpulkan dari berbagai sumber menunjukkan bahwa jumlah PKL di koridor ini bervariasi antara 150 hingga 200 pedagang, tergantung pada definisi dan klasifikasi yang digunakan. Jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan (Tambunan, 2022), terdapat indikasi bahwa jumlah PKL di kawasan ini cenderung meningkat dari waktu ke waktu, seiring dengan meningkatnya popularitas kawasan sebagai destinasi kuliner. Peningkatan ini terjadi meskipun pemerintah telah melakukan berbagai upaya penertiban, yang menunjukkan bahwa faktor pendorong keberadaan PKL kebutuhan ekonomi dan permintaan pasar jauh lebih kuat dari faktor penghambat yang ditimbulkan oleh kebijakan penertiban.

Penelitian (Tambunan, 2022) tentang tingkat pelayanan fasilitas pedestrian di Jalan Soemantri Brojonegoro memberikan gambaran penting tentang kondisi fisik kawasan. Menurut penelitian tersebut, jalur pedestrian di koridor ini secara teknis telah memenuhi standar minimal lebar yang ditetapkan dalam regulasi tata ruang, yakni sekitar 1,5 hingga 2 meter. Namun, kondisi di lapangan menunjukkan bahwa lebar efektif trotoar yang dapat digunakan oleh pejalan kaki jauh lebih sempit karena sebagian besar lahannya telah diduduki oleh lapak PKL dan kendaraan parkir. Kondisi ini mencerminkan ketegangan fundamental antara fungsi formal ruang sebagai jalur pedestrian sebagaimana direncanakan dalam dokumen tata ruang, dengan fungsi nyata sebagai ruang ekonomi bagi pedagang kecil yang menggantungkan hidupnya pada aktivitas berdagang di lokasi tersebut.

Dinamika Implementasi Kebijakan Penataan PKL

Implementasi kebijakan penataan PKL di kawasan Soemantri Brojonegoro oleh Pemerintah Kota Jambi dilakukan melalui serangkaian operasi penertiban yang dilaksanakan secara berkala oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) bersama dengan instansi terkait lainnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan dari kalangan aparat pemerintah, operasi penertiban ini umumnya dilatarbelakangi oleh dua faktor utama. Pertama, keluhan yang disampaikan oleh pengguna jalan dan warga sekitar tentang kemacetan, kesemrawutan, dan terganggunya aktivitas sehari-hari akibat keberadaan PKL yang tidak tertata. Kedua, kebutuhan pemerintah untuk menunjukkan kinerja penegakan peraturan daerah sebagai bagian dari upaya menjaga citra dan ketertiban kota, terutama menjelang acara-acara tertentu atau kunjungan pejabat penting.

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

409

Indexed



SINTA 4

PKP|INDEX



Temuan lapangan menunjukkan bahwa operasi penertiban di kawasan ini mengikuti pola yang relatif konsisten. Tahap pertama biasanya berupa sosialisasi dan pemberian peringatan kepada pedagang untuk memindahkan lapak mereka atau menyesuaikan posisi berjualan sesuai ketentuan yang berlaku. Tahap kedua, bagi pedagang yang tidak mengindahkan peringatan, adalah pemindahan paksa lapak oleh petugas Satpol PP ke lokasi penampungan sementara. Tahap ketiga, yang diterapkan bagi pedagang yang dinilai melanggar berulang kali, adalah penyitaan barang dagangan dan pemberian sanksi administratif lebih lanjut. Dalam beberapa kasus yang ekstrem, pedagang juga dijatuhi denda atau dilaporkan ke pihak kepolisian untuk proses lebih lanjut.

Namun demikian, pengamatan yang dilakukan peneliti selama periode lapangan mengungkapkan fenomena yang menarik: sebagian besar pedagang yang terkena operasi penertiban kembali menempati lokasi semula dalam waktu yang relatif singkat setelah operasi berakhir. Berdasarkan wawancara dengan beberapa pedagang, terdapat beberapa alasan yang mendorong mereka untuk kembali ke lokasi awal. Pertama, lokasi di koridor Soemantri Brojonegoro dinilai strategis karena ramai pengunjung yang menjadi potensi pelanggan utama. Kedua, lokasi alternatif yang disediakan pemerintah umumnya kurang menguntungkan dari segi aksesibilitas dan visibilitas usaha. Ketiga, kebutuhan mengejar pendapatan harian membuat pedagang tidak memiliki waktu luang untuk menunggu situasi mereda atau mencari lokasi baru yang lebih baik.

Fenomena siklus penertiban dan kembalinya pedagang ini menciptakan apa yang dapat disebut sebagai "keberlanjutan kebijakan yang bersifat semu." Pemerintah dapat mengklaim telah melakukan penertiban dan menegakkan peraturan daerah, yang terlihat dari laporan operasi lapangan dan dokumentasi kegiatan. Namun di sisi lain, kondisi di lapangan tidak mengalami perubahan fundamental PKL tetap berjualan di lokasi yang sama, trotoar tetap tersumbat, dan kemacetan tetap terjadi pada jam-jam sibuk. Ketidaksesuaian antara output kebijakan (jumlah operasi penertiban yang dilaksanakan) dengan outcome kebijakan (perubahan perilaku pedagang dan kondisi ruang) ini menunjukkan kompleksitas implementasi kebijakan yang tidak dapat diselesaikan semata melalui pendekatan penertiban.

Relasi Kuasa dan Jaringan Aktor dalam Arena Penataan PKL

Penelitian ini mengidentifikasi setidaknya empat kelompok aktor utama yang memiliki kepentingan dan peran berbeda dalam arena penataan PKL di kawasan Soemantri Brojonegoro. Kelompok pertama adalah aparat pemerintah, khususnya Satpol PP sebagai eksekutor lapangan dan Dinas Perdagangan serta Dinas Pekerjaan Umum sebagai perumus kebijakan teknis. Kelompok kedua adalah pedagang PKL yang tersebar di sepanjang koridor, dengan variasi dalam hal jenis dagangan, lama berjualan, dan tingkat formalitas izin yang dimiliki. Kelompok ketiga adalah pemilik ruko dan usaha formal di kawasan tersebut, yang memiliki kepentingan terhadap aksesibilitas, estetika, dan kondisi usaha di sekitar bangunan mereka. Kelompok keempat adalah aktor informal yang mencakup koordinator pedagang, tokoh masyarakat, dan pihak-pihak lain yang memiliki pengaruh terhadap dinamika di lapangan namun tidak memiliki posisi formal dalam struktur pemerintahan.

Relasi kuasa antara kelompok-kelompok aktor ini terbentuk melalui interaksi sehari-hari yang tidak selalu tercatat dalam dokumen resmi. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, dapat diidentifikasi beberapa pola relasi yang menarik. Pertama, antara pedagang PKL dengan Satpol PP terdapat relasi yang ditandai oleh keseimbangan kekuatan yang tidak simetris namun tidak sepenuhnya timpang. Di satu sisi, Satpol PP memiliki otoritas formal untuk menegakkan peraturan dan memberikan sanksi. Di sisi lain, pedagang memiliki pengetahuan lokal, jaringan sosial, dan kemampuan adaptif yang memungkinkan mereka bertahan di tengah tekanan regulasi. Interaksi antara kedua kelompok ini tidak selalu berbentuk konfrontasi, melainkan seringkali melibatkan negosiasi, kompromi, dan pemahaman bersama tentang batasan-batasan yang dapat dinegosiasikan.

Pedagang PKL di kawasan ini mengembangkan berbagai strategi adaptif untuk bertahan di tengah tekanan kebijakan. Strategi pertama adalah pengaturan waktu berjualan, di mana pedagang memfokuskan

aktivitasnya pada jam-jam tertentu yang dianggap relatif aman dari operasi penertiban, seperti pagi hari sebelum jam kerja pejabat atau malam hari setelah jam operasional petugas. Strategi kedua adalah modifikasi ukuran dan posisi lapak, di mana pedagang mengecilkan atau memindahkan lapak mereka ke lokasi yang lebih tersembunyi ketika ada indikasi akan adanya operasi penertiban. Strategi ketiga adalah pembangunan hubungan baik dengan berbagai pihak, termasuk pemilik ruko di sekitar lokasi dan bahkan beberapa aparat, untuk mendapatkan informasi dini tentang operasi penertiban dan mengurangi risiko penindakan.

Relasi antara PKL dengan pemilik ruko menunjukkan dinamika yang lebih kompleks. Berdasarkan temuan penelitian, terdapat dua kelompok pemilik ruko dengan sikap yang berbeda terhadap keberadaan PKL di depan bangunan mereka. Kelompok pertama, yang umumnya mengusahakan jenis dagangan yang serupa dengan PKL atau membutuhkan aksesibilitas tinggi bagi pelanggan, memiliki sikap negatif dan mendukung penertiban. Kelompok kedua, yang umumnya mengusahakan jenis dagangan komplementer atau diuntungkan oleh keramaian yang diciptakan PKL, memiliki sikap netral atau bahkan positif terhadap keberadaan pedagang informal di sekitar lokasi mereka. Perbedaan sikap ini mempengaruhi dinamika di lapangan, di mana PKL yang berjualan di depan ruko pemilik yang mendukung keberadaannya cenderung mendapat perlindungan informal dan risiko penertiban yang lebih rendah.

Aktor informal, khususnya koordinator pedagang dan tokoh lokal, memainkan peran penting dalam mengatur relasi antara berbagai pihak. Koordinator pedagang, meskipun tidak memiliki posisi formal, seringkali menjadi perantara komunikasi antara pedagang dengan pemerintah dan pihak-pihak lain. Mereka dapat berfungsi sebagai mediator yang membantu mencegah eskalasi konflik, namun juga dapat menjadi pihak yang memobilisasi resistensi terhadap kebijakan yang dianggap merugikan pedagang. Keberadaan aktor informal ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tidak terjadi dalam ruang hampa sosial, melainkan di tengah jaringan relasi sosial yang kompleks dan memiliki logikanya sendiri.

Kebijakan sebagai Proses Politik

Hasil temuan penelitian ini menguatkan pandangan teoretis bahwa implementasi kebijakan publik tidak dapat dipahami hanya sebagai pelaksanaan peraturan tertulis secara mekanis, melainkan sebagai proses politik yang diwarnai negosiasi, kompromi, dan relasi kuasa antaraktor. Perspektif ini selaras dengan argumentasi (Alim, 2024) bahwa kebijakan publik merupakan arena di mana berbagai aktor bersaing untuk mempengaruhi keputusan sesuai dengan kepentingan masing-masing. Dalam konteks penataan PKL di kawasan Soemantri Brojonegoro, proses implementasi kebijakan tidak sekadar melibatkan penerapan aturan teknis tentang tata ruang dan ketertiban, melainkan juga melibatkan dinamika politik tentang siapa yang berhak mengakses ruang publik dan dengan cara bagaimana.

Konsep ruang publik sebagai arena kontestasi kepentingan yang dikemukakan oleh (Fitriana et al., 2020) sangat relevan untuk memahami fenomena di kawasan ini. Ruang publik tidak hanya berfungsi sebagai wadah fisik yang netral, melainkan juga sebagai arena di mana berbagai kelompok sosial memperebutkan akses dan kontrol terhadap sumber daya spasial. Dalam kasus Soemantri Brojonegoro, contestation ini terjadi antara logika perencanaan kota yang menekankan efisiensi, estetika, dan ketertiban dengan logika kehidupan yang menekankan aksesibilitas pasar, visibilitas usaha, dan pendapatan harian. Kedua logika ini tidak dapat sepenuhnya direkonsiliasi dalam kerangka regulasi yang ada, sehingga memunculkan zona-zona negosiasi dan kompromi yang membentuk wajah aktual kebijakan di lapangan.

Temuan penelitian ini juga mengkonfirmasi perspektif (Shields, 2013) tentang perbedaan antara conceived space (ruang yang dikonsepsikan dalam regulasi dan perencanaan) dengan lived space (ruang yang dialami dan dihidupi oleh masyarakat). Trotoar di koridor Soemantri Brojonegoro, dalam dokumen perencanaan, conceived sebagai ruang untuk pejalan kaki yang aman dan nyaman. Namun dalam realitas sehari-hari, lived space tersebut telah bertransformasi menjadi ruang hibrid yang menggabungkan fungsi pedestrian dengan fungsi komersial informal. Transformasi ini bukan sekadar pelanggaran yang harus ditertibkan, melainkan juga ekspresi dari kebutuhan sosial-ekonomi yang tidak tertampung dalam

kerangka perencanaan formal.

Konsep "Spatial Justice" atau keadilan spasial yang dikaji oleh (Widiatedja & SH, 2026) memberikan perspektif kritis untuk mengevaluasi kebijakan penataan PKL yang ada. Keadilan spasial menekankan bahwa distribusi manfaat dan beban perkotaan harus adil di antara semua warga kota, tanpa membedakan status sosial, ekonomi, atau lokasi tempat tinggal. Dalam konteks penataan PKL, prinsip ini menuntut agar kebijakan tidak hanya mempertimbangkan kepentingan pengguna ruang yang lebih powerful seperti pemilik kendaraan bermotor dan pemilik usaha formal melainkan juga kepentingan kelompok marginal seperti pedagang informal yang menggantungkan hidupnya pada akses terhadap ruang publik. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan yang ada saat ini belum sepenuhnya mengakomodasi prinsip keadilan spasial, karena cenderung memprioritaskan estetika dan ketertiban tanpa mempertimbangkan dampak terhadap penghidupan pedagang.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan penataan PKL di Kawasan Soemantri Brojonegoro merupakan proses politik yang sarat kontestasi kepentingan, di mana terdapat kesenjangan signifikan antara regulasi formal dan praktik di lapangan. Meskipun Satpol PP rutin melakukan penertiban, fenomena "keberlanjutan semu" muncul karena pedagang cenderung kembali ke lokasi semula demi kelangsungan ekonomi dan akses pasar yang strategis. Hal ini diperkuat oleh peran Satpol PP sebagai *street-level bureaucracy* yang menggunakan diskresi luas untuk melakukan negosiasi dan kompromi informal, sehingga menciptakan zona abu-abu antara kepatuhan dan pelanggaran aturan. Dinamika ini menunjukkan bahwa ruang publik di koridor Sipin bukan sekadar wadah fisik, melainkan arena perebutan kekuasaan antara logika estetika pemerintah dan kebutuhan hidup pedagang.

Sebagai solusi, penelitian ini merekomendasikan transformasi kebijakan dari pendekatan top-down menuju model yang lebih inklusif, deliberatif, dan berkeadilan spasial. Pemerintah Kota Jambi disarankan untuk memperkuat mekanisme dialog yang melibatkan PKL, pemilik ruko, dan masyarakat dalam perencanaan agar kebijakan yang dihasilkan memiliki legitimasi sosial yang tinggi. Penataan ruang harus mampu menyinergikan fungsi pedestrian dengan aktivitas ekonomi informal secara adil, tanpa memprioritaskan kelompok yang lebih berkuasa. Dengan demikian, kawasan Soemantri Brojonegoro dapat berkembang menjadi ruang publik yang tertib sekaligus tetap menjadi tumpuan ekonomi bagi kelompok masyarakat rentan.

REFERENSI

- lin, A. H., & Wibawani, S. (2023). Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima. *Public Policy (Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik & Bisnis)*, 4(2), 391–406. <https://doi.org/10.51135/PublicPolicy.v4.i2.p391-406>
- Alim, M. S. (2024). *Ilmu Politik & Kebijakan Publik*. Mega Press Nusantara.
- Allam, M. A., Rahajuni, D., Ahmad, A. A., & Binardjo, G. (2019). Faktor yang mempengaruhi pendapatan pedagang kaki lima (PKL) di Pasar Sunday Morning (Sunmor) Purwokerto. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Akuntansi*, 21(2), 1–11. <https://doi.org/10.32424/jeba.v21i2.1328>
- Anugrah, D. C. (2024). *Efektivitas Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) Pada Pasar Tradisional di Kota Jambi (Studi kasus pada Pasar Tradisional Aur Duri di Kota Jambi)*. Universitas Jambi.
- Blakelock, E., & Turnpenny, J. (2022). The Impact of Participatory Policy Formulation on Regulatory Legitimacy: The Case of Great Britain's Office of Gas and Electricity Markets (Ofgem). *Policy & Politics*, 50(4), 507–525. <https://doi.org/10.1332/030557321X16510710879298>
- Fitriana, R., Auliya, A. U., & Widiyarta, A. (2020). Analisis kebijakan penataan pedagang kaki lima dalam perspektif kebijakan deliberatif. *Jurnal Governansi*, 6(2), 93–103. <https://doi.org/10.30997/jgs.v6i2.2863>

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

412

Indexed



SINTA 4

PKP|INDEX



- Hanum, N. (2017). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan pedagang kaki lima di Kota Kuala Simpang. *Jurnal Samudra Ekonomika*, 1(1), 72–86.
- Hikam, R. M. (2023). The Implementation of Terrorism Prevention Policy: The Challenges of Counter-Radicalization Program in East Java. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 57–73. <https://doi.org/10.33701/jkp.v6i2.3668>
- Hupe, P., Nangia, M., & Hill, M. (2013). *Studying Implementation Beyond Deficit Analysis Reconsidering the Top-Down View*. January 2004, 1–21.
- Inderianti, R. A., Hardiani, H., & Rosmeli, R. (2020). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan pedagang kaki lima di Kota Jambi (studi kasus warung manisan Kecamatan Telanaipura). *E-Jurnal Perspektif Ekonomi Dan Pembangunan Daerah*, 9(3), 109–118. <https://doi.org/10.22437/pdpd.v9i3.12485>
- Jacobs, T., & George, A. (2023). How Gender Is Socially Constructed in Policy Making Processes: A Case Study of the Adolescent and Youth Health Policy in South Africa. *International Journal for Equity in Health*, 22(1). <https://doi.org/10.1186/s12939-022-01819-w>
- Matovich, I., & Esper, T. (2023). Following New Philanthropy by Network Ethnography: How Did the Varkey Foundation Land and Expand in Latin America? *Ecnu Review of Education*, 6(4), 541–567. <https://doi.org/10.1177/20965311231168422>
- Mulyana, A., Vidiati, C., Danarahmanto, P. A., Agussalim, A., Apriani, W., Fiansi, F., Fitra, F., Aryawati, N. P. A., Ridha, N. A. N., & Milasari, L. A. (2024). *Metode penelitian kualitatif*. Penerbit Widina.
- Prasetyo, R. D. (2026). *Politik Parkir Kuasa, Kebijakan, Dan Perebutan Ruang Kota di Indonesia*. CV HEI Publishing Indonesia.
- Rantelabi, O. (2022). *Analisis Penataan Ruang Terbuka Publik Lapangan Bakti Di Kabupaten Toraja Utara Berdasarkan Persepsi Masyarakat= Analysis Of Public Space" Bakti Field" In North Toraja Regency Based On Public Perseption*. Universitas Hasanuddin.
- Sabdey, A., Suryadi, S., Zauhar, S., & Setyowati, E. (2023). *The Role of Actors in the Implementation of Spatial Planning Policy in Lamandau Regency in the Slogan Nanga Bulik Kota Indah*. 51–59. https://doi.org/10.2991/978-2-38476-082-4_6
- Septian Md, M. (2024). *Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Tugu Keris Kota Jambi*. Universitas Jambi.
- Shields, R. (2013). Lefebvre and the Right to the Open City? *Space and Culture*, 16(3), 345–348. <https://doi.org/10.1177/1206331213491885>
- Tambunan, D. (2022). *Evaluasi tingkat pelayanan jalur pejalan kaki (studi kasus: jalan Sumantri brojonegoro kota Jambi)*. Universitas Jambi.
- Tatik Wijaya. (2024). *Malam Pergantian Tahun, Lalulintas di Kawasan Sipin Kota Jambi Ramai Lancar*. berita.rri. <https://berita.rri.co.id/jambi/regional/1230086/malam-pergantian-tahun-lalulintas-di-kawasan-sipin-kota-jambi-ramai-lancar>
- Widiatedja, I. G. N. P., & SH, M. (2026). *Hukum Tata Ruang Di Era Pembangunan Tak Berkelanjutan Kritik, Refleksi, dan Solusi*. Prenada Media.